

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TURKI UNTUK BERSEDIA MENJADI PENENGAH MASALAH NUKLIR IRAN

Dalam Bab ini penulis ingin Membahas faktor yang mempengaruhi Turki untuk bersedia menjadi penengah masalah Nuklir Iran yang terdiri atas : kondisi politik dalam negeri Turki, kemampuan Ekonomi dan Keamanan, konteks internasional.

A. Kondisi Politik Dalam Negeri

Pada tahun 1919-1923 terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Kecemerlangan politik Mustafa Kemal dalam peperangan, yang dikenal sebagai perang kemerdekaan Turki, mengantarkannya menjadi pemimpin dan juru bicara gerakan nasionalisme Turki. Gerakan nasionalisme ini, yang pada waktu itu merupakan leburan dari berbagai kelompok gerakan kemerdekaan di Turki, semula bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Turki dari rebutan negara-negara sekutu. Namun pada perkembangan selanjutnya gerakan ini diarahkan untuk menentang Sultan.

Mustafa Kemal mendirikan Negara Republik Turki setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Meskipun demikian, Mustafa Kemal

Gagasan sekularisme Mustafa Kemal banyak mendapat inspirasi dari pemikiran Ziya Gokalp, seorang sosiolog Turki yang diakui sebagai Bapak Nasionalisme Turki. Pemikiran Ziya Gokalp adalah sintesa antara tiga unsur yang membentuk karakter bangsa Turki, yaitu ke-Turki-an, Islam dan Modernisasi.

Kronologi sejarah di atas, penulis uraikan untuk menerangkan suatu kondisi sosial politik pada masa Usmani yang membentuk pemikiran dan gerakan sekuler Mustafa Kemal. Politik Kemalis ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu supaya Turki dapat masuk dalam peradaban Barat. Oleh karena itulah penghapusan kekhalifahan merupakan agenda pertama yang dilaksanakan. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan kekhalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Republik Turki.

Reformasi agama adalah salah satu contoh tindakan ekstrim dari rezim Kemalis setelah penghapusan khalifah. Reformasi ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan politik negara dan mengakhiri kekuatan tokoh-tokoh agama dalam masalah politik, sosial dan kebudayaan. Selain itu Mustafa Kemal juga mengajukan pemikiran tentang nasionalisme agama. Menurutnya agama merupakan suatu

lembaga sosial dan karena itu harus disesuaikan dengan sosial dan budaya masyarakat Turki.

Peradaban menurut Mustafa Kemal, berarti peradaban Barat. Tema utama dari pandangannya tentang Barat adalah bahwa Turki harus menjadi bangsa Barat dalam segala tingkah laku. Selain reformasi agama, reformasi yang paling penting dari rezim Kemalis adalah reformasi bahasa. Tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin, berdasarkan undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Nasional Agung pada 3 November 1928. Tujuan reformasi bahasa adalah membebaskan bahasa Turki dari 'belenggu' bahasa asing. Penekanannya adalah pemurnian bahasa Turki dari bahasa Arab dan Persi. Mustafa Kemal mengadakan kunjungan di banyak tempat untuk mengajar secara langsung tulisan baru pada rakyat Turki.

Tentang sekularisasi dan modernisasi di Turki pada masa Rezim Kemalis seperti diuraikan di atas, Bryan S. Turner, seorang guru besar sosiologi di Universitas Flinders (Australia Selatan), menyimpulkan bahwa sekularisme tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah rezim, bukanlah sekularisasi yang tumbuh sebagai suatu konsekuensi dari proses modernisasi seperti di negara-negara Eropa. Selain itu sekularisasi di Turki pada saat itu merupakan peniruan secara sadar pola tingkah laku masyarakat Eropa yang dianggap modern dan

berpikiran rasional seperti orang-orang Eropa, tetapi juga harus meniru tatacara berperilaku dan berpakaian seperti mereka.

Mustafa Kemal meninggal dunia pada tanggal 10 November 1938, setelah tiga kali menjabat sebagai presiden Republik Turki, yaitu pada tahun 1927, 1931 dan 1935. Mustafa Kemal diakui berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di Turki. Partai Republik rakyat adalah partai politik yang dibentuk Mustafa Kemal untuk menjalankan roda Pemerintahan. Meskipun demikian, sejarah Turki menunjukkan pemerintahan Kemal dengan sistem pemerintahan satu partai tidak memberi ruang bagi kemunculan partai oposisi. Iklim Demokrasi muncul kemudian sejak Turki menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan terus berkembang menunjukkan kemajuan yang pesat. Daniel Lerner (di dalam Memudarnya Masyarakat Tradisional, 1983) telah melakukan penelitian yang mendalam di suatu kota dekat Ankara pada tahun 1950-an, dan menyimpulkan bahwa negara Turki telah tumbuh menjadi negara yang relatif lebih stabil dan demokratis di banding dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.

Reformasi budaya, terutama sekularisasi agama dan pemakaian hukum Barat menggantikan hukum Islam, memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan masyarakat Turki. Sekularisasi agama pada masa Kemalis (1923-1950) melahirkan generasi Turki yang jauh dari agamanya. Bahasa Turki yang dituturkan oleh generasi ini adalah

bahasa nasional Turki. Sedangkan pemakaian hukum-hukum Barat juga diadaptasi dengan berbagai tingkatan kesulitan di berbagai lapisan masyarakat.

Kemudian muncul partai keadilan dan pembangunan dalam politik domestik negeri Turki, telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan Turki diberbagai bidang, AKP berkuasa pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan dari Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gul pada 2001, dengan perolehan 34% suara. Di Turki partai politik harus mencapai minimal 10% suara untuk mendapatkan perwakilan di parlemen dan pada tahun 2002 AKP adalah salah satu dari dua partai yang memperoleh suara tersebut, yang lainnya adalah Partai Rakyat Republik, atau CHP, dengan perolehan 19% suara. kemudian pada tahun 2007 Turki kembali mengadakan pemilihan umum, dan pada pemilu ini Turki memperoleh suara lebih banyak dari pada pemilu sebelumnya yaitu 46,5% suara. Kemengan ini juga menghantarkan Recep Tayyep Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki, dan juga Abdullah Gul sebagai Presidennya. sehingga semakin memperkuat pengaruh dan kekuasaan AKP⁵⁰.

Yang menarik perhatian, fenomena gerakan Islam Politik di beberapa negara Muslim, justru terjadi di saat banyak kalangan banyak mengkritik tajam keberadaan Islam Politik, disamping meramalkan jika abad ke-21 adalah tranformasi gagal dan tamatnya riwayat Islam Politik.

Secara sederhana, Islam politik dapat diartikan sebagai gerakan Islam yang

⁵⁰<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.cdfai.org/PDF/Turke>

berorientasi kepada perjuangan politik dalam rangka mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam. Kalangan Islam Politik memiliki argumen bahwa Islam adalah sistem pemikiran global dan menyeluruh (kâffah dan syumûl), termasuk di dalamnya adalah politik. Antara Islam dan Politik adalah dua sisi mata uang yang silih berkaitan, erat dan tidak dapat saling dipisahkan. Islam membutuhkan politik sebagai wasilah, demikian juga politik menghajatkan Islam sebagai muara asas dan ghayah.

Dahulunya politik islam diduga akan mengancam dasar sekuler Turki, karena akan mempersulit partai yang berlandaskan sekuler untuk berpartisipasi. Soner Cagaptay juga berpendapat bahwa AKP belajar dari pengalaman politik sebelumnya pihak-pihak yang tidak bisa mempertahankan kekuasaan pada platform anti-sekuler.

Sebagian kalangan mengatakan gerakan Islam Politik sebagai gerakan omong kosong, penuai kegagalan, penjual ayat-ayat Tuhan, sekaligus reduksisasi agama (dalam hal ini Islam). Dari segi reduksasi agama, misalnya, Muhammad Arkoun, pemikir Muslim kontemporer Prancis asal Aljazair, dalam salah satu karangannya, *al-Islâm, al-Akhlâq, wa as-Siyâsah* secara tegas mengkritik wacana politik Islam dan Islam politik. Hemat Arkoun, Islam dan politik adalah dua hal yang berseberangan dimensi. Agama adalah sesuatu yang bersifat kudus dan absolut, sementara politik lebih bersifat "kotor" (*dhidd al-qudsiyyah*) dan

profan. Ketika dua hal yang dalam bahasa Arkoun "silih bertentangan"

ini dipadukan, maka yang terjadi adalah absurditas. Islam yang sakral akan dibawa dan diseret-seret dalam wilayah politik yang kotor dan korup, dan pada akhirnya akan merusak samawiyah Islam itu sendiri.

Kritik tegas juga datang dari Islamolog kawakan asal Prancis, Oliver Roy. Dalam bukunya, *L'Echec de l'Islam Politique*, Roy menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas Islam yang berorientasi politik atau "Islam politik" telah gagal menawarkan model masyarakat baru maupun masa depan dunia Islam yang cerah. Kenyataan yang ada adalah justru sebaliknya: Islam hanya dijadikan komoditas jualan politis tanpa menghasilkan perubahan apapun.⁵¹

Kemenangan politik kaum Islamis di negeri Muslim hanyalah membawa perubahan superfisial di bidang hukum dan adat istiadat. Islamisme, belakangan, berubah menjadi tipe neo-fundamentalisme yang hanya peduli pada penegakan kembali syari'at Islam, tanpa menciptakan bentuk-bentuk politik yang baru. Perekonomian yang mereka gagas hanyalah alasan belaka, sekedar menyelubungi bentuk sosialisme dunia Islam maupun liberalisme ekonomi. Yang kemudian terjadi adalah, realitas sosial-ekonomi yang menopang gelombang Islamisme tetap berjalan di tempat dan tidak kunjung berubah yaitu kemiskinan, alienasi, krisis nilai dan identitas, kemerosotan sistem pendidikan dan seterusnya⁵².

⁵¹ http://afkar.numesir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:akp-turki-garis-baru-islam-politik-masa-depan&catid=4:diskursus&Itemid=28

⁵² Anjar Nugroho: 2007

Apa yang dilayangkan oleh Arkoun dan Roy tidak sepenuhnya mutlak keliru. Keduanya juga berangkat dari kenyataan sejarah, sosial, politik, dan budaya negara-negara Muslim, apalagi jika memang berkaca kepada Saudi Arabia dan Taliban-Afganistan. Kedua entitas tersebut adalah wujud paling nyata atas gagalnya “politik Islam” dan “Islam politik” seperti yang digambarkan di atas. Kritikan Arkoun dan Roy sangat mengena dalam hal ini. Di satu sisi, Saudi Arabia adalah perwujudan negara Islam, namun di sisi yang lain Saudi Arabia juga adalah negara yang korup. Kehidupan di Saudi Arabia juga sangat tidak mencerminkan dari apa yang dikatakan Islami dan berperadaban. Yang ada justru sebaliknya, Saudi Arabia tak lebih beda dari perwujudan masyarakat yang hidup dalam jubah agama dan gelimpah kemodernan. Demikian juga di Afganistan masa Taliban, kemiskinan, alienasi, krisis nilai dan identitas, serta kemerosotan sistem pendidikan sebagaimana yang dinyatakan Roy adalah penerjemahan langsung tak langsung dari rezim Islam Politik yang ada di negeri itu.

Namun, tidak dibenarkan juga jika kita menutup mata dari faktor-faktor lain yang turut mendasari lahirnya fenomena Islam Politik, terutama di negara-negara Muslim yang disebutkan di atas. Salah satunya, menguatnya geliat Islam dan menggelombangnya gerakan Islam Politik adalah sebagai bentuk kekecewaan mereka atas gagalnya penguasa, yang berhaluan Islam Sekuler, dalam membangun kesejahteraan rakyat dan negara. Kemunculan Islam Politik dalam hal ini adalah di

diterjemahkan sebagai sebetulnya “purik”, reaksi, dan bahkan perlawanan atas status quo yang korup, tiran, dan tak kunjung membawa perubahan berarti.

Jadi, jika selama ini logika yang dipakai untuk menganalisa Islam Politik adalah “menjual agama demi meraih kekuasaan”, maka pada kasus ini selayaknya logika tersebut sesekali harus dibalik, yaitu “menjadikan agama sebagai spirit persatuan, pembebasan, dan perubahan”.

Tentu saja, keberadaan Islam Politik di setiap negara memiliki ideologi dan fenomenanya masing-masing. Sementara ini, banyak kalangan yang menganggap jika ideologi yang dibawa oleh kalangan Islam Politik adalah ideologi Islam yang keras, kaku, jumud, anti-pencerahan, anti-kemajuan, anti-Barat, anti-demokrasi, anti-sekulerisme, dan seterusnya. Bagi sebagian gerakan Islam Politik yang ada, bisa jadi kenyataannya memang demikian.

Namun, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri dari sekian banyak fenomena Islam Politik yang ada. Di tengah anggapan banyak kalangan yang menggambarkan perwujudan Islam Politik sebagai penjelmaan Islam yang keras, kaku, anti-sekuler, dan anti-demokrasi itu, AKP Turki justru berhasil membalik dan bahkan merubuhkan mitos di atas.

Sebagai kekuatan politik yang terus mengalami kebangkitan, Turki tidak ragu-ragu lagi untuk menempatkan dirinya di tengah kontroversi

besar. Pada bulan lalu saja, upaya mediasi Turki ikut memantau krisis

nuklir Iran, dan Ankara mendukung armada yang baru-baru ini mencoba untuk memecahkan blokade Israel di Gaza, secara langsung ikut menaikkan posisi Turki di antara negara-negara dunia.

Semangat neo-Ottoman Turki menjiwai kembali secara dinamis dikalangan rakyat dan para pemimpin Turki. Setelah kegagalan dan kekalahan kaum sekuler, bayang-bayang Ottoman mulai mewarnai corak demokrasi Islam yang moderat. Setelah Turki didominasi oleh militer, maka sekarang para pemimpin militer harus tunduk dengan aturan hukum. Militer Turki tidak lagi menjadi sangat mudah membubarkan partai politik yang dituduh ingin mengancam konstitusi Turki yang masih sekuler, tetapi perlahan-perlahan bergerak ke arah yang lebih jelas, menuju kehidupan yang Islami. Tetapi, semuanya berjalan secara alamiah.

Setelah ekonomi melemah dalam beberapa dekade, kini Turki memainkan peranan sangat penting dalam kebijakan luar negerinya. Ini sebagai akibat dari ketundukan dan menjadi pengikut setia Amerika Serikat selama dalam beberapa dekade. Kini, Turki dengan Menlu Ahmed Davotuglu dan Perdana Menteri Tayyib Recep Erdogan, justru menjadi isiator politik dan mempunyai peran yang sentral dalam isu regional. Ini Turki yang baru. Sehingga, dalam percaturan politik, posisi Turki yang secara geopolitik sangat strategis, berhasil dimanfaatkan secara cerdas oleh para pemimpinnya untuk kepentingan nasionalnya, dan sekaligus

Turki mengarahkan kebijakan politik luar negeri ke Timur Tengah, dan ini dapat menepis posisi Amerika Serikat, yang selama ini telah menjadi 'payung' di Timur Tengah. Politik di Timur Tengah secara tradisional selalu dibawah pengaruh Washington, dan tidak pernah berubah. Dan, sekarang Turki mencoba lebih mendekat kepada Timur Tengah, sebagai langkah untuk mengubah keseimbangan. Nampaknya, pada abad ke-21, Turki mengalami sebuah transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi sambil memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai sosial yang bersumber dari Islam, dan memiliki daya tarik yang cukup besar ke negara-negara di dunia berkembang.

Konsensus "Ankara" suatu hari nanti bisa bersaing baik melawan Beijing, dan pembangunan politik dan ekonomi versi Washington. Model Turki, bagaimanapun juga mendapat dorongan sayap kanan (Islam), dan Barat sangat khawatir tentang ancaman Islam fundamentalis baru yang muncul di tepi Eropa. Seorang tokoh cendekiawan Neo-konservatif Liz Cheney bahkan menciptakan sebuah versi baru dari "mantan Presiden AS George W Bush poros jahat", di mana Turki, Iran dan Suriah telah menjadi trinitas jahat. Kelompok Neokons sangat panik dengan perubahan di Turki, yang sangat tidak ramah kepada Israel.

Turki akan melampaui negara-negara Eropa lainnya, yang sekarang ini bersaing dengan kekuatan baru bernama Turki. Turki memiliki

bangsanya, untuk kembali menguasai dunia, seperti yang pernah dilakukan para kakek moyang mereka, yaitu imperium Turki Otsmani.⁵³

B. Kemampuan Ekonomi dan Militer

1. Ekonomi

AKP Turki benar-benar fenomena baru dalam lanskap sejarah politik Islam (*as-Siyâsah al-Islâmiyyah*), sekaligus gerakan Islam politik (*al-Islâm as-Siyâsi*). AKP Turki mampu memadukan secara baik dua unsur yang selama ini kerap dipandang bertentangan, yaitu Islamisme dan Sekulerisme. AKP Turki juga mampu merubuhkan tesis yang dikemukakan Olover Roy, yang menyatakan jika “Islam Politik gagal menawarkan model masyarakat baru maupun masa depan dunia Islam yang cerah”.

Jika melihat fenomena yang terjadi di Turki, dilihat dari kebangkitan ekonomi dan pemerintahannya yang bersih, boleh dibilang ini sebagai contoh sebuah kegagalan sebuah sistem sekularisasi. Di akhir masa pemerintahan kubu sekuler, ekonomi Turki benar-benar terpuruk. Negara Timur-Muslim yang dipaksa untuk menjadi Barat-Sekuler sejak 1924 dibawah gerakan Kemalisme itu mengalami inflasi ekonomi yang sangat tinggi (hingga 41 %). Mata uang Lira Turki pun jatuh hingga sampai titik terburuk. Bisa dibayangkan, hingga tahun 2001 saja, 1 Dolar Amerika sama dengan 1.500.000 Lira Turki.

Proyek Sekularisme di Turki selama ini adalah contoh gagal sebuah proyek sekularisme yang salah kaprah, kacau dan lebih banyak gagalnya. Ini karena nampaknya agenda yang dijalankan Kemal terlalu reaktif bersemangat hendak menghapuskan identitas kultural era Turki Utsmani, sehingga modernisme yang dilakukan Kemal menjadi modernisasi yang sangat dangkal/superfisial, bisa dikatakan hanya sekedar mengganti westernisasi.

Namun, setelah pemerintahan dipegang dan dijalankan oleh AKP, beberapa perbaikan pun segera terjadi. Di bawah kepemimpinan Recep Tayep Erdogan, sang za'im AKP yang kemudian menjadi perdana menteri, kondisi Turki segera bergerak ke titik yang lebih baik. Dan semua itu terjadi dalam kurun waktu yang tak lebih dari satu dekade. Sektor Ekonomi yang semula kacau pun segera pulih. Inflasi dapat dikendalikan dan perlahan-lahan menurun, bahkan mampu mencapai pertumbuhan 8%. Perekonomian tumbuh konsisten 8% pertahunya. Mata uang Lira pun menguat. Pada tahun 2005, 1 Dolar Amerika (USD) sama dengan 1,5 Lira Turki Baru (YTL) saja.

Kuatnya sendi ekonomi dapat membantu mengatkan sendi-sendi negara lainnya, utamanya infrastruktur. Pada masa pemerintahan AKP, pembangunan pun terjadi dalam skala yang pesat di kota-kota. Di tengah krisis global yang menjadikan banyak negara di dunia mengalami kebangkrutan dan kehilangan lapangan pekerjaan, Turki justru mampu bertahan dan bahkan terus membuka peluang-peluang kerja. Maka tak

heran, jika orang-orang pedesaan dan pelosok yang pada masa pemerintahan kubu sekuler tidak pernah mengalami keuntungan ekonomi yang hanya berkembang di kalangan elit, di masa AKP, mereka dapat merasakan keuntungan tersebut mereka pun berbondong-bondong menuju kota sekaligus dapat menjadi pekerja dan pengusaha.⁵⁴

Seiring perkembangannya, permasalahan yang terjadi di Iran, dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Turki, karena Turki dan Iran merupakan Negara yang berada di Timur tengah dan mempunyai perekonomian yang kuat, namun kondisi ini diperparah dengan akan dikeluarkannya sanksi baru terhadap iran. Sehingga Sanksi tersebut bisa mempengaruhi perekonomian kedua Negara khususnya Turki.

2. Militer

Turki tergabung kedalam NATO ada tanggal 18 february 1952, sampai saat ini, Turki telah memberi kontribusi US \$ 340 juta untuk Dana Infrastruktur NATO karena telah bergabung dengan NATO Infrastruktur Program pada tahun 1953. Sebagai imbalannya, Turki menerima hampir US \$ 5,2 miliar bagian dari dana infra NATO. Tentara Turki telah terlibat dalam konflik dengan kelompok separatis dan teroris sejak awal 1980-an, terkonsentrasi di Turki tenggara . Terutama Komando Brigade 1 berbasis di Kayseri , Brigade Komando ke-2 yang berbasis di Bolu , dan Kelautan

⁵⁴ http://afkar.numesir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5:akp-turki-garis-baru-islam-politik-masa-depan&catid=4:di-luar-negeri&Itemid=28

Amfibi Brigade (3 Commando Brigade) yang berbasis di Foca / Izmir dikerahkan selama peperangan.

Sebagian besar persenjataan yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Turki berasal dari AS, selain itu pemasok senjata Turki adalah Jerman, Israel, Inggris, Perancis dan Rusia. Turki memiliki Angkatan Bersenjata yang lebih besar dibandingkan dengan Perancis dan Britania, dengan 514.000 prajurit utama dan 380.000 prajurit cadangan, ditambah angkatan udara yang kuat dengan pesawat tempur Amerika. Sebenarnya merupakan 2 kekuatan terbesar yang bergabung dalam NATO setelah Amerika Serikat, dan 8 jumlah tentara aktif terbesar di dunia.

Oleh karena itu, Turki mempunyai hubungan yang baik dengan Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, terkait masalah nuklir Iran, posisi Turki menjadi sebuah dilema bagi Turki itu sendiri, dimana Turki tidak bisa memihak salah satu, dikarenakan Turki juga mempunyai hubungan yang baik dengan Iran sebagai Negara yang sama-sama berada di Timur Tengah.⁵⁵

C. Konteks Internasional

Iran melakukan diplomasi yang komprehensif tentang program nuklirnya. Iran berusaha meyakinkan kepada dunia, bahwa mereka berhak mengembangkan program nuklirnya untuk kepentingan damai. Mereka menjelaskan program nuklir Iran bukan untuk kepentingan militer. Mereka

⁵⁵ www.allaboutturkey.com/army.htm

belum dapat mengembangkan senjata nuklir. Yang dikerjakan, menurut mereka, adalah pengayaan uranium untuk kepentingan energi. Mereka juga menjelaskan, bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), mereka merasa berhak mengembangkan nuklir untuk kepentingan damai. Iran mengatakan program nuklirnya adalah untuk tujuan damai meningkatkan tenaga listrik.

Turki sebagai Negara yang berdekatan dengan Iran, melihat permasalahan yang terjadi di Negara tetangganya dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi Turki itu sendiri, Turki yang mempunyai hubungan yang baik kepada kedua belah negara yang bertikai sangatlah berpotensi untuk menengahi permasalahan nuklir Iran ini, karena selain kondisi geografis Turki yang berdekatan dengan Iran, kondisi ekonomi dan militer serta dukungan dari rakyat turki dan negara lain juga menjadi pendukung agar Turki bisa menengahi kasus nuklir Iran ini, dan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan di Washington. Presiden AS Barack Obama mengatakan Turki bisa menjadi "pemain penting" dalam menyelesaikan konflik atas program nuklir Iran ini. Amerika berharap Turki bisa memainkan perannya sebagai penengah dan peran Turki tersebut mampu menekankan pentingnya menyelesaikan masalah nuklir Iran dengan cara mengizinkan Iran mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dan memberikan

jaminan bahwa program nuklir itu mematuhi aturan-aturan dan norma internasional.⁵⁶

Selain itu, Iran juga berharap dengan bersedianya Turki sebagai penengah untuk masalah nuklirnya ini, Turki mampu mencari solusi atau jalan terbaik agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, Menlu Mottaki pada Sabtu mengatakan Iran berencana akan berunding dengan semua 15 anggota Dewan Keamanan PBB dalam usaha mengatasi jalan buntu menyangkut perjanjian bahan bakar nuklir. Dan Turki akan terus melakukan usaha terbaik mereka untuk segera menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran ini, salah satunya yaitu dengan berdiplomasi.